

PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2017

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2017

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348

Bantul - DI Yogyakarta 55711

e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Bantul adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Bantul. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bantul, 10 Juli 2017

Kuasa Pengguna Anggaran,
Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan
Tatalaksana,

NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H.
NIP.198305262002122001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
C.1. Aset Lancar.....	41
C.2. Aset Tetap	42
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	49
C.6. Ekuitas	49
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	50
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	50
D.2. Beban Pegawai	50

D.3.	Beban Persediaan	51
D.4.	Beban Barang dan Jasa	52
D.5.	Beban Pemeliharaan	52
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	53
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	54
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	54
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	55
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	55
D.11.	Beban Lain-lain.....	56
D.12.	Kegiatan Non Operasional	56
D.13.	Pos Luar Biasa	57
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	58
E.1.	Ekuitas Awal	58
E.2.	Surplus (defisit) LO	58
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset	58
E.3.	2 Koreksi Nilai Persediaan	58
E.3.	3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	59
E.3.	4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	59
E.3.	5 Koreksi Lain-lain	59
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	59
E.4.	1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	60
E.4.	2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	60
E.3.	Ekuitas Akhir.....	61
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	62
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	62
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	62
	Daftar dan Lampiran	64
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	65
	Daftar Hibah Langsung.....	68

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Bantul

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH. No.04 Bantul - DI Yogyakarta 55711

Telp. 0274367348 Fax. 0274367348 e-mail : pn_bantul@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bantul, 10 Juli 2017

Kuasa Pengguna Anggaran,

Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana,

NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H.

NIP.198305262002122001

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2017 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2017 s.d. 30 Juni 2017 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp7.299.346 atau mencapai 110,60 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp6.600.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp2.868.865.913 atau mencapai 41.17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp6.969.023.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2017 dan 2016 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.066.155.742, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp58.778.170; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp6.007.377.572; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp50.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp50.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp6.016.155.742, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp8.778.170 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp6.007.377.572.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp7.202.480, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.833.678.268 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp2.826.475.788) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp198.546 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp2.826.277.242)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp5.980.866.417 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp2.826.277.242).kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp0). dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.861.566.567 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah senilai Rp6.016.155.742.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI BANTUL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2017 DAN 2016 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2017			TA 2016
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	6.600.000	7.299.346	110,60	6.406.360
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		6.600.000	7.299.346	110,60	6.406.360
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	5.787.410.000	2.435.653.640	42,09	2.878.156.472
2.	Belanja Barang	B.2.2.	964.713.000	296.462.273	30,73	212.930.184
3.	Belanja Modal	B.2.3.	216.900.000	136.750.000	63,05	0
	Jumlah Belanja Negara		6.969.023.000	2.868.865.913	41.17	3.091.086.656

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI BANTUL
NERACA
PER 30 Juni 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	30 Juni 2016
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	50.000.000	0
Persediaan	C.1. 2.	8.778.170	5.376.775
Jumlah Aset Lancar		8.778.170	5.376.775
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	4.089.224.000	4.089.224.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.261.190.209	2.124.440.209
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	5.065.365.550	5.065.365.550
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	29.150.000	29.150.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	48.152.062	48.152.062
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(5.485.704.249)	(5.380.803.679)
Jumlah Aset Tetap		6.007.377.572	5.975.528.142
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	74.570.000	74.570.000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	58.921.000	58.921.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	(133.491.000)	(133.491.000)
Jumlah Aset		6.066.155.742	5.980.904.917
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	38.500
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	50.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		50.000.000	38.500

Jumlah Kewajiban		50.000.000	38.500
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar		C.6	
Jumlah Ekuitas Dana		6.016.155.742	5.980.866.417
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		6.066.155.742	5.980.866.417

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2017	2016
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	7.202.480	6.406.360
Jumlah Pendapatan		7.202.480	6.406.360
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2.435.653.640	2.878.156.472
Beban Persediaan	D. 3	34.570.935	17.218.800
Beban Barang dan Jasa	D. 4	181.295.399	133.234.384
Beban Pemeliharaan	D. 5	61.666.724	54.200.250
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	15.591.000	2.420.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	104.900.570	108.912.263
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.833.678.268	3.194.142.169
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.826.475.788)	(3.187.735.809)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	198.546	464.890
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	53.800
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		198.546	411.090
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		198.546	411.090

Pos Luar Biasa	D. 13	
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(2.826.277.242)	(3.187.324.719)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI BANTUL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2017 DAN 2016
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2017	30 Juni 2016
Ekuitas Awal	E. 1	5.980.866.417	6.135.067.879
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.826.277.242)	(3.187.324.719)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			(68.086.875)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	(68.086.875)
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2.861.566.567	3.084.680.296
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	35.289.325	(170.731.298)
Ekuitas Akhir		6.016.155.742	5.964.336.581

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagian

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Bantul

Visi Pengadilan Negeri Bantul adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul yang Agung”. dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Bantul.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bantul .
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bantul.

Untuk mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri Bantul melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Bantul adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) **Ekuitas**

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp7.299.346*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 7.299.346 atau mencapai 110,60 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 6.600.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Bantul adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.600.000	2.978.800	82,74
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3.000.000	4.223.680	140,78
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	96.866	0,00
Total Pendapatan		6.600.000	7.299.346	110,60

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 892,986 atau 12,23 persen dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan karena :
Meningkatnya pendapatan sewa rumah dinas;karena sudah terisinya rumah dinas oleh hakim-hakim yang mutasi ke Pengadilan Negeri Bantul.

Perbandingan realisasi PNPB TA 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNPB per 30 Juni TA 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	2016	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.978.800	1.513.600	1.465.200	49,19
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	4.223.680	4.892.760	(669.080)	15,84
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	96.866		96.866	00,00
Total Pendapatan		7.299.346	6.406.360	892.986	12,23

B.2. Belanja

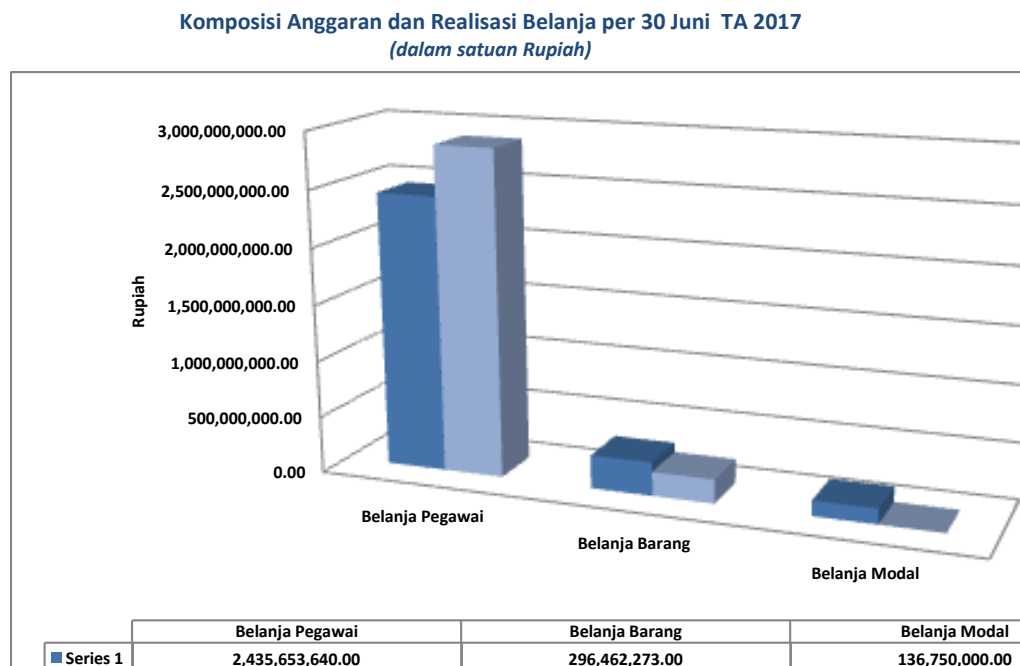
*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
2.868.865.913*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.868.865.913 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 41.17% dari anggaran senilai Rp. 6.969.023.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2017		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.787.410.000	2.435.653.810	42,09
Belanja Barang	964.713.000	296.462.273	30,73
Belanja Modal	216.900.000	136.750.000	63,05
Total Belanja Bruto	6.969.023.000	2.868.866.083	41.17
Pengembalian Belanja		(170)	0
Total Belanja Netto	6.969.023.000	2.868.865.913	41.17

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2017 & 2016

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar (Rp. 222.220.743) atau sebesar (7,75) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena: Belanja Pegawai Gaji Ke-13 Terealisasi pada bulan Juli 2017 sehingga penyerapan belanja pegawai Tahun 2017 lebih rendah dibandingkan penyerapan belanja pegawai Tahun 2016.

Perbandingan realisasi belanja TA 2017 dan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2.435.653.640	2.878.156.472	(442.502.832)	(18,17)
Belanja Barang	296.462.273	212.930.184	83.532.089	28,17
Belanja Modal	136.750.000	0	136.750.000	00,00
Total Belanja	2.868.865.913	3.091.086.656	(222.220.743)	(7,75)

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
2.435.653.640*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 2.435.653.640 dan Rp. 2.878.156.472.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami penurunan sebesar (18,17) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Belum terealisasinya gaji ke-13 dan juga kosongnya kepala-kepala sub bagian dan sekretaris pada Pengadilan Negeri Bantul.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.282.006.600	1.481.917.880	(199.911.280)	(15,59)
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.888	15.446	442	2,78
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	71.852.330	85.720.342	13.868.012	19,30
Beban Tunj. Anak PNS	18.034.338	21.990.436	(3.956.098)	(21,94)
Beban Tunj. Struktural PNS	2.940.000	11.620.000	(8.680.000)	(29,52)
Beban Tunj. Fungsional PNS	737.935.000	896.255.000	(158.320.000)	(21,45)
Beban Tunj. PPh PNS	66.616.974	125.127.206	(58.510.232)	(87,83)
Beban Tunj. Beras PNS	61.846.680	60.760.380	1.086.300	1,76
Beban Uang Makan PNS	175.716.000	173.500.000	2.216.000	1,26
Beban Tunjangan Umum PNS	18.690.000	21.250.000	(2.560.000)	(13,70)
Beban Uang Lembur	0	0	0	0,00
Beban Tunj. Lain-lain	0	0	0	0
Termasuk Uang Duka PNS				
Dalam dan Luar Negeri				
Total Belanja Brutto	2.435.653.810	2.878.156.690	(442.502.800)	(18,17)
Pengembalian Belanja	(170)	(218)	(48)	(28,24)
Total Belanja Netto	2.435.653.640	2.878.156.472	(442.502.832)	(18,17)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp296.462.273

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 296.462.273 dan Rp. 212.930.184.

Realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 28,18 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain oleh :

1. meningkatnya Belanja operasional dan juga belanja pemeliharaan serta belanja perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2017 ini.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	173.275.460	110.025.256	63.250.204	36,50
Belanja Barang Non Operasional	1.943.000	4.180.000	(2.237.000)	115,13
Belanja Jasa	46.346.739	44.316.728	2.030.000	4,38
Belanja Pemeliharaan	59.306.074	51.988.200	7.317.874	12,33
Belanja Perjalanan Dinas	15.591.000	2.420.000	13.171.000	84,47
Total Belanja Brutto	296.462.273	212.930.184	83.532.089	28,18
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	296.462.273	212.930.184	83.532.089	28,18

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi
Belanja
Modal
:Rp136.750.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 136.750.000 dan Rp. 0.

Realisasi Belanja Modal TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2016. Hal ini disebabkan antara lain:

Belanja modal peralatan dan mesin telah terealisasi sebagian pada Tahun Anggaran 2017 ini sedangkan pada semester I pada Tahun Anggaran 2016 belum terealisasi.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	136.750.000	0	136.750.000	100
Total Belanja Brutto	136.750.000	0	136.750.000	100
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	136.750.000	0	136.750.000	100

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
58.778.170

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp. 58.778.170 dan Rp. 5.376.775.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Bantul per 30 Juni 2017 dan 2016 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2017 dan 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016
Kas di Bendahara Pengeluaran	50.000.000	0
Persediaan	8.778.170	5.376.775
Total Aset Lancar	58.778.170	5.376.775

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 50.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp.50.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2017	30 Juni TA 2016
1	Giro	50.000.000	0
Jumlah		50.000.000	0

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp8.778.180*

Persediaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.778.180 dan Rp. 5.376.775. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan 30 Juni 2016

No.	Uraian	30 Juni 2017	30 Juni 2016
1	Barang Konsumsi	8.547.720	4.849.775
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	230.450	527.000
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		8.778.170	5.376.775

Seluruh persediaan telah dilakukan opname fisik persediaan dengan surat nomor : W13.U5/1653/PL.07/VII/2017.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
6.007.377.572*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 tersaji sebesar Rp. 6.007.377.572 dan Rp. 5.975.528.142. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2017	TA 2016	Perubahan
1	Tanah	4.089.224.000	4.089.224.000	0
2	Peralatan dan Mesin	2.261.190.209	2.124.440.209	136.750.000
3	Gedung dan Bangunan	5.065.365.550	5.065.365.550	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	29.150.000	29.150.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	48.152.062	48.152.062	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	11.356.331.821	11.250.866.821	136.750.000
	Akumulasi Penyusutan	(5.485.704.249)	(5.380.803.679)	(104.900.570)
	Nilai Buku Aset Tetap	6.007.377.572	5.975.528.142	31.849.430

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp4.089.224.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.089.224.000 dan Rp. 4.089.224.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	295	SHP No.18	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	185.906.000
2	2	305	SHP No. 17	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	183.056.000
3	3	324	SHP No. 16	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	197.696.000
4	4	358	SHP No. 36	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	222.016.000
5	5	391	SHP No. 19	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	246.386.000
6	6	399	SHP No. 20	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	251.426.000

Agung RI						
7	7	434	SHP No. 37	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	273.476.000
Agung RI						
8	8	630	SHP No. 06	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Rumah Dinas	459.956.000
Agung RI						
9	1	2.759	SHP No. 07	Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI	Kantor	2.069.306.000
Agung RI						
Jumlah						4.089.224.000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 Tidak mengalami kenaikan atau tetap hal ini disebabkan karena pada TA 2017 ini tidak ada belanja modal Pembelian Tanah yang dilakukan oleh kantor Pengadilan Negeri Bantul.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2.261.190.209*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.261.190.209 dan Rp. 2.124.440.209.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	2.124.440.209
Mutasi Tambah	
Pembelian	136.750.000
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2017	2.261.190.209
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	(2.017.584.964)
Nilai Buku 30 Juni 2017	243.605.245

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 mengalami kenaikan hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2017 ini terdapat belanja modal peralatan dan mesin berupa alat pengolah data.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
5.065.365.550*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.065.365.550 dan Rp. 5.065.365.550.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2016	5.065.365.550
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2017	5.065.365.550
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	(3.444.799.285)
Nilai Buku 30 Juni 2017	1.620.566.265

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 Tidak mengalami kenaikan atau tetap hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2017 ini tidak ada belanja modal Pembelian gedung dan bangunan yang dilakukan oleh kantor Pengadilan Negeri Bantul.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
29.150.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 29.150.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	29.150.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2017	29.150.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	(23.320.000)
Nilai Buku 30 Juni 2017	5.830.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 Tidak mengalami kenaikan atau tetap hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2017 ini tidak ada belanja modal Pembelian jalan, irigasi dan jaringan yang dilakukan oleh kantor Pengadilan Negeri Bantul.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
48.152.062*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 48.152.062 dan Rp. 48.152.062.

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 Tidak mengalami kenaikan atau tetap hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2017 ini tidak ada belanja modal Pembelian Aset Tetap Lainnya yang dilakukan oleh kantor Pengadilan Negeri Bantul.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2016	48.152.062
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2017	48.152.062
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2017	0
Nilai Buku 30 Juni 2017	48.152.062

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(Rp5.485.704.249
)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing (Rp5.485.704.249) dan Rp(5.380.803.679).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2017 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)				
No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.261.190.209	2.017.584.964	243.605.245
2	Gedung dan Bangunan	5.065.365.550	3.444.799.285	1.620.566.265
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	29.150.000	23.320.000	5.830.000
4	Aset Tetap Lainnya	48.152.062	0	0
Jumlah		7.267.107.821	5.485.704.249	1.870.001.510

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp 74.570.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 74.570.000 dan Rp. 74.570.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud (dalam satuan Rupiah)		
No.	Uraian	Nilai
1	Software	74.570.000
Jumlah Total		74.570.000

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 pada Pengadilan Negeri Bantul berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor Pengadilan Negeri Bantul. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama Tahun Anggaran 2017.

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp 58.921.000

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 58.921.000 dan Rp. 58.921.000. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Bantul serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2016	58.921.000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	(58.921.000)
Saldo per 30 Juni 2017	0

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2017 dan 30 Juni 2016 Tidak mengalami kenaikan atau tetap hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2017 ini tidak ada Aset lain-Lain yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional kantor Pengadilan Negeri Bantul.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp 50.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas:
Rp
6.016.155.742

Ekuitas per 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.016.155.742 dan Rp5.980.866.417. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2017 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 49.961.500 (99,9%) dari nilai per 30 Juni TA 2016. Jumlah nilai Kewajiban dan Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2017 adalah sebesar Rp. 6.066.155.742 , sedangkan per 31 Desember TA 2016 tercatat sebesar Rp. 5.964.336.581.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBp : Rp7.202.480 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp7.202.480 dan Rp6.406.360. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.120.000	2.978.800	82,74
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2.400.000	4.223.680	140,78
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0		0,00
Total Pendapatan		6.600.000	7.202.480	110,59

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 2.435.653.640 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.435.653.640 dan Rp2.878.156.472. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.282.006.600	1.481.917.880	(199.911.280)	(13,49)
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.718	15.228	490	3,21
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	71.852.330	85.720.342	(13.868.012)	(16,17)
Beban Tunj. Anak PNS	18.034.338	21.990.436	(3.956.098)	(17,99)
Beban Tunj. Struktural PNS	2.940.000	11.620.000	(8.680.000)	(74,69)
Beban Tunj. Fungsional PNS	737.395.000	896.255.000	(158.320.000)	(17,66)
Beban Tunj. PPh PNS	66.616.974	125.127.206	(58.510.232)	(46,76)
Beban Tunj. Beras PNS	61.846.680	60.760.380	1.086.300	1,78
Beban Uang Makan PNS	175.716.000	173.500.000	2.216.000	1,27
Beban Tunjangan Umum PNS	18.690.000	21.250.000	(2.560.000)	(12,04)
Beban Uang Lembur	0	0	0	0,00
Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar Negeri	0	0	0	0
Total Beban Pegawai	2.435.653.640	2.878.156.472	(442.502.832)	(15,37)

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp34.570.935*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp34.570.935 dan Rp17.218.800. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	34.570.935	17.218.800	17.352.135	100,77
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	34.570.935	17.218.800	17.352.135	100,77

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp181.295.399*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp181.295.399. dan Rp133.234.384. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	74.685.160	60.838.156	13.847.004	22,76
Beban Pengiriman Surat	7.226.100	3.149.500	4.076.600	129,43
Beban Honor Satker	20.450.000	20.750.000	(300.000)	(1,44)
Beban Barang Ops.lainnya	30.682.900	0	30.682.900	0
Beban Bahan	1.943.000	0	1.943.000	0
Beban Langganan Listrik	43.665.715	42.080.318	1.585.397	3,76
Beban Langgana Telepon	2.313.224	1.965.210	348.014	17,70
Beban Langganan Air	329.300	271.200	58.100	21,42
Total Beban Jasa	181.295.399	133.234.384	48.061.015	36,07

Seluruh persediaan telah dilakukan opname fisik persediaan dengan surat nomor : W13.U5/1653/PL.07/VII/2017

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp 61.666.724*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah

masing-masing sebesar Rp61.666.724 dan Rp54.200.250. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.051.400	9.532.539	(2.481.139)	(26,02)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2.503.000	1.988.162	514.838	25,89
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	49.751.674	40.467.499	9.284.175	22,94
Beban Pemeliharaan lainnya	2.360.650	2.212.050	148.600	29,52
Total Beban Pemeliharaan	61.666.724	54.200.250	7.466.474	13,77

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp15.591.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.591.000. dan Rp2.420.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	15.591.000	220.000	15.371.000	6.986,81
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	2.200.000	(2.200.000)	00,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	15.591.000	2.420.000	13.171.000	544,25

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Bantuan Sosial
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi :
Rp104.900.570*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp104.900.570. dan Rp108.912.263. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.598.570	56.801.107	(5.202.537)	(9,15)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.844.500	50.653.656	1.190.844	2,35
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.457.000	1.457.000	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah Penyusutan	104.900.570	108.912.263	(4.011.693)	(3,68)
Beban Amortisasi Software	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain				
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	104.900.570	108.912.263	6.483.125	(26,81)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain
: Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional :
Rp198.546

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	96.866	0	96.866	00,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	101.680	464.890	(363.210)	78,12
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	53.800	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	198.546	411.090	(212.544)	(157.29)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2017 dan TA 2016
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.980.866.417. dan Rp6.135.067.879.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar (Rp2.826.277.242). dan (Rp3.187.324.719). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0. Dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp(68.086.875). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.861.566.567 dan Rp3.084.680.296.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(7.299.346)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.868.865.913
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	2.861.566.567

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2017, DDEL sebesar (Rp7.299.346). sedangkan DKEL sebesar Rp2.868.865.913.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, sebesar Rp0-. dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2017.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2017 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.016.155.742 dan Rp5.964.336.581

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak Terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Bantul adalah:

1. BRI Cabang Bantul A/C 0236-01-000627-30-2 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI BANTUL 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.134.273.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :
Perubahan pejabat perbendaharaan karena KPA pada awal tahun masih kosong belum ada pejabat yang mengisinya kemudian ditunjuklah plt. Sekretaris sebagai KPA.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB yang dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2017 di Pengadilan Negeri Bantul terdapat Pejabat Pengelola Keuangan yang Purna Tugas (Pensiun) oleh karena itu dilakukan penggantian Pejabat tersebut hal ini Berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Mahkamah Agung RI Nomor: 5/PA/SK/01/2017 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Negeri Bantul.

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Sumiyati.

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : Niken Kusumaratri Sudarmaji, SH

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Bantul

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan s.d.	Beban Penyusutan	Total Akumulasi s.d.	Nilai Buku
				Per 30 Juni 2017	Per 30 Juni 2017	Per 30 Juni 2017	Per 30 Juni 2017
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	7	18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	0
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	691.015.828	667.009.041	12.003.349	679.012.435	12.003.393
3	Alat Kantor	5	197.094.750	193.623.972	1.406.926	195.030.898	2.063.852
4	Alat Rumah Tangga	5	693.470.631	552.294.381	8.410.750	560.705.131	42.765.500
5	Alat Studio	5	27.430.000	7.530.000	1.990.000	9.520.000	17.910.000
6	Alat Komunikasi	5	7.890.000	7.890.000	0	7.890.000	0
7	Komputer Unit	4	508.446.000	381.542.875	16.796.875	398.339.750	110.106.250
8	Peralatan Komputer	4	208.581.000	138.834.125	10.990.625	149.824.750	58.756.250
B.	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	4.237.232.550	2.844.698.408	43.407.836	2.888.106.244	1.349.126.306
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	733.000.000	533.986.427	7.485.334	541.471.761	191.528.239

3	Tugu/tanda Batas	50	95.133.000	14.269.950	951.330	15.221.280	79.911.720
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
1	Jalan	10	29.150.000	21.862.500	1.457.500	23.320.000	5.830.000
D.	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	48.152.062	0	0	0	48.152.062
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1	Alat Angkut Darat Bermotor	7	850.000	850.000	0	850.000	0
2	Alat Kantor	5	38.872.000	38.872.000	0	38.872.000	0
1	Alat Rumah Tangga	5	17.366.000	17.366.000	0	17.366.000	0
2	Komputer Unit	4	1.833.00	1.833.00	0	1.833.00	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		7.489.934.759	5.515.032.679	104.900.570	5.619.933.249	1.870.001.510
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		7.538.086.821	5.563.184.741	153.052.632	5.668.085.311	1.918.153.572

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Negeri Bantul
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
		U				Nilai	Keterangan
				n i h i l			
	Jumlah :						



Catatan atas

n Keuangan

005

01

0400

400172

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NE

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEM

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}